

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

##### 2.1.1 Definisi UMKM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 (2008), usaha mikro, kecil dan menengah didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

##### 2.1.2 Kriteria UMKM

Kriteria suatu badan usaha dapat disebut sebagai usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 ayat 2 (2008), adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **2.2 LAPORAN KEUANGAN**

### **2.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Kieso dkk (2007: 43) laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam unit moneter. Menurut Sadeli (2000:18) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kualitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya, serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Warren dkk (2005:24) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menghasilkan informasi bagi para pemakainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses akuntansi yang mengkomunikasikan informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### 2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang dibuat dinilai wajar apabila sesuai dengan standar akuntansi yang sedang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

### 2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam standar akuntansi umum (SAK Umum) (IAI, 2009) dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Dimana terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.

IAI (2009:2) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

## 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

#### 4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

#### 5. Substansi menggugah bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

#### 6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan

kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

#### 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

#### 8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

#### 9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan

informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan Biaya Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

#### 2.2.4 Pentingnya Laporan Keuangan Bagi UMKM

Menurut Darmadji (2007:200), dengan tidak melakukan pembukuan, pemilik dan manajer UMKM tidak akan mampu untuk mengelola badan usaha secara baik akibat minimnya informasi yang ada serta diragukannya reliabilitas dari informasi yang dimilikinya. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat disusun secara sederhana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari badan usaha, namun tidak mengurangi esensi serta manfaat dari penerapan sistem tersebut.

Pemanfaatan dari sistem akuntansi yang baik, juga memungkinkan disusunnya laporan keuangan dan analisis rasio sebagai dasar bagi manajemen dan pemilik UMKM untuk menilai kemampuan, likuiditas, solvabilitas, serta berbagai ukuran lain bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial dan strategis lainnya. Darmadji (2007:200) menambahkan bahwa, penyusunan sistem akuntansi pada UMKM harus tetap berupaya untuk mencapai pengendalian internal yang baik, dimana tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mengamankan seluruh aktiva atau harta kekayaan dari badan usaha, meningkatkan keakuratan pencatatan dan informasi akuntansi, mendorong kegiatan operasional badan usaha yang berdasar pada efektivitas dan efisiensi, serta dipatuhinya segala kebijakan dari pemilik dan manajer UMKM oleh seluruh karyawannya.

### **2.3 Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

#### **2.3.1 Definisi SAK ETAP**

Menurut IAI (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki karakteristik berikut ini :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila memenuhi karakteristik berikut ini :

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi.

### **2.3.2 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP**

#### **1. Pendapatan**

Menurut IAI (2009: 114) pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan sebagai berikut:

##### **a. Pengakuan**

Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi tersebut terpenuhi :

- 1) Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli.
- 2) Entitas tidak mempertahankan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual.
- 3) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- 4) Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.

5) Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

b. Pengukuran

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

c. Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan:

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa.
- 2) Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari;
  - a) Penjualan barang
  - b) Penyediaan jasa
  - c) Bunga
  - d) Royalti
  - e) Dividen
  - f) Jenis pendapatan signifikan lainnya.

2. Beban

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

- a. Analisis menggunakan sifat beban. Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh: penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan imbalan kerja) serta tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

Misal :

Pendapatan	X
Pendapatan operasi lain	X
Perubahan persediaan	
Barang jadi dan barang dalam proses	x
Bahan Baku yang digunakan	x
Beban Pegawai	x
Beban Penyusutan dan amortisasi	x
Beban Operasi Lainnya	x
Jumlah Beban Operasi	<u>(x)</u>
Laba Operasi	<u>X</u>

- b. Analisis menggunakan fungsi beban. Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang – kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Misal:

Pendapatan	x
Beban Pokok Penjualan	(x)
Laba Bruto	<u>x</u>
Pendapatan Operasi Lainnya	x
Beban Pemasaran	(x)
Beban Umum dan administrasi	(x)
Beban Operasi lain	(x)
Laba Operasi	<u><u>x</u></u>

Beban dapat muncul dari aktivitas beberapa akun berikut :

a. Persediaan

Menurut IAI, (2009:52) persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Entitas harus mengungkapkan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode dan jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi.

b. Aset Tetap

Menurut IAI (2009:68) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap tidak termasuk hak atas mineral dan cadangan mineral.

Entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga beli, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, estimasi awal biaya pembongkaran, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokal. Pengeluaran setelah pengakuan awal aset hanya diakui sebagai aset jika pengeluaran tersebut meningkatkan kondisi aset melebihi standar kinerja semula.

Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Untuk setiap kelompok aset tetap, entitas harus mengungkapkan sebagai berikut:

- 1) Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
- 2) Metode penyusutan yang digunakan.

- 3) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rui, penyusutan dan perubahan lainnya.

Selain itu, entitas juga harus mengungkapkan:

- 1) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk utang.
- 2) Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.

#### c. Imbalan Kerja

Menurut IAI (2009:131) imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan:

- 1) Sebagai kewajiban, setelah dikurang jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada pekerja atau sebagai kontribusi kepada dana imbalan kerja.

- 2) Sebagai beban, kecuali bab lain mensyaratkan biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset tetap.

### **2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

Menurut IAI (2009: 23) entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut ini:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas.
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi neto.

### **2.3.4 Perubahan Kebijakan Akuntansi Sesuai dengan SAK ETAP**

Menurut IAI (2009: 37) kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya.

Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut disyaratkan berubah oleh SAK ETAP atau akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas.

#### 1. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas harus mencatat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP sesuai dengan ketentuan transisinya.
- b. Entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif.

#### 2. Penerapan Retrospektif

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal dimana hal tersebut adalah praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan kewajiban pada periode sajian paling awal dimana penerapan retrospektif adalah praktis (mungkin

periode berjalan) dan membuat penyesuaian korespondensi ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh.

### 3. Pengungkapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Ketika penerapan awal SAK ETAP atau perubahannya mempunyai pengaruh ke periode berjalan atau periode lalu, maka entitas harus mengungkapkan hal-hal di bawah ini :

- a. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi.
- b. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh.
- c. Jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan.
- d. Penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang diungkapkan di poin b dan c.

### 2.3.5 Tanggal Efektif

IAI (2009:166) menyatakan bahwa SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Prisilia (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Studi Kasus Pada CV Adi Buana- KTV Inul Vista Malang

mengungkapkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, mencatat transaksi, yakni mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan keluar masuknya kas dengan pencatatan *single entry*. Kedua, mengakui unsur-unsur laporan keuangan yakni meliputi aset, kewajiban, pendapatan, beban dan ekuitas. Terakhir, membuat laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Beberapa kendala dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perusahaan (belum memiliki keahlian akuntansi yang memadai).
2. Kurangnya kesadaran pemilik tentang pentingnya laporan keuangan.

